

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebelum era reformasi negara Indonesia merupakan negara yang damai, tertib, dan makmur. Kehidupan ekonomi masyarakatnya terpenuhi, mulai dari mudahnya lapangan pekerjaan, harga sembako yang murah, harga BBM yang rendah serta tata krama dan sopan santun perilaku masyarakatnya sangat terlihat. Suasana ini tercipta cukup lama dimasa kepemimpinan bapak presiden Soeharto. Namun Sejak era reformasi bergulir pada tahun 1997/1998, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Negara Indonesia mengalami krisis multidimensi, mulai dari krisis identitas, budaya, spiritualitas dan kepercayaan. Sehingga menimbulkan dampak buruk bagi setiap masyarakat Indonesia.

Terjadi perubahan perilaku pada masyarakat Indonesia baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat cenderung berperilaku sensitive, lebih bertindak agresif, dan mudah melakukan tindakan kekerasan. Perilaku agresif dan tingkat kriminalitas cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat dari pemberitaan di televisi, media cetak, dan siaran berita di radio. Tidak hanya itu saja, dampak reformasi terlihat dari perubahan sikap mental dan emosi masyarakat Indonesia dalam berperilaku. menimbulkan banyak elemen masyarakat mulai dari buruh, LSM, sampai organisasi sering tidak terkontrol dalam melakukan aksi unjuk rasa, sehingga memaksa anggota polisi untuk bertindak agresif.

Dalam hal pengamanan negara, pemerintah membentuk 2 lembaga yang bertugas mengamankan situasi keamanan negara yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang mempunyai tugas pokok menjaga keutuhan NKRI. Dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) yang mempunyai tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. Namun semenjak tahun 2000 secara kelembagaan POLRI lepas dari TNI, sehingga sejak saat itu Polri memegang kekuasaan penuh dalam hal keamanan

dalam negeri. Dalam institusi polri ada 2 bagian fungsi teknis yang terdiri dari POLGASUM (Polisi Penugasan UMUM) dan POLGASUS (Polisi penugasan khusus). Dalam POLGASUM terdiri dari fungsi teknis Reserse, Intelkam, Lalu lintas, Pam Obvit, dan Sabhara. Dalam fungsi teknis Sabhara terdapat 2 satuan unit yaitu unit patroli dan unit dalmas. Pada sat unit dalmas merupakan penugasan polisi di garis terdepan. maksudnya, melihat dari tugasnya yaitu pengendalian massa pada aksi unjuk rasa. Oleh karena itu, banyak kejadian-kejadian yang sering dialami para anggota dalmas khususnya di sat dalmas polda metro jaya yang merupakan wilayah hukum paling kompleks.

Polri sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara yang memiliki tugas pokok menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat. Dituntut untuk bekerja secara profesional Oleh karena itu, prosedur untuk penerimaan dan rekrutment anggota polisi tersebut sangat selektif dan melalui beberapa tahapan yang panjang. seperti, tes administrasi, tes kesehatan 1, tes psikologi, tes akademik, tes kesehatan 2 (jasmani), tes antropometri, dan tes pentuhir. Ini diharapkan dapat menghasilkan para calon anggota polisi pilihan yang profesional dan memiliki kecakapan dan dedikasi yang tinggi.

Persyaratan dan rekrutment yang selektif diharapkan melahirkan para anggota polisi yang siap menjalankan tugasnya dimanapun mereka ditugaskan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. Selain itu, disamping tugas polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, anggota polri juga harus dapat bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat dan dapat memberikan tauladan yang baik. karena setiap anggota polri diberi tanda kewenangan oleh negara untuk menjalankan tugasnya. kewenangan ini yang membedakan anggota polisi dengan masyarakat sipil sebagai anggota di dalam lembaga yang dibentuk oleh negara.

Kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap lembaga kepolisian merupakan kebanggaan tersendiri bagi setiap anggota polisi. Sehingga timbul rasa korps yang tinggi, loyalitas terhadap pimpinan dan tugas negara yang merupakan identitas sosial dari anggota polisi tersebut. Tidak hanya kewenangan yang



menjadi sebuah kebanggaan, tetapi banyaknya kegiatan-kegiatan yang mendorong persaudaraan dan kesatuan seperti kegiatan masa Dasbha (Dasar Bhayangkara) dalam pendidikan, kegiatan lintas medan, Dikjur, kegiatan pembaretan, serta kegiatan pembinaan tradisi.

Menurut Tajfel (1982) Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. kelompok sosial dalam hal ini adalah lembaga atau institusi polri, jadi mereka merasa bagian dari lembaga polri tersebut. Maka dia akan membela dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik institusi dan berkorban dengan jiwa dan raga, mereka akan bertindak agresif jika institusi polisi dilecehkan, dihina, dan di caci maki serta direndahkan.

Identitas sosial yang dibangun kelompok bisa melalui simbol, nilai, budaya, bahas dan visi. Ketika semua sudah terinternalisasikan pada setiap anggota kelompok, maka timbul komitmen, solidaritas, dan tanggung jawab terhadap sesama anggota dan kelompok. banyak perilaku agresif yang terjadi antar kelompok karena perasaan tidak terima anggota kelompoknya disakiti oleh kelompok lain. Identitas sosial telah mengikat setiap anggota kelompok, dan telah menjadikan arah petunjuk anggota dalam bersikap dan berperilaku. Ketika tujuan kelompok tidak sesuai dengan tujuan individu, maka terjadi sebuah dilema dalam diri individu. Dilema ini terjadi karena ada kepentingan pesonal dan kelompok berbeda. Bila tidak mengikuti norma kelompok, maka ia akan “ditinggalkan” atau tidak dihargai, sedangkan bila diikuti akan bertentang dengan identitas personalnya. Kalau ia memiliki komitmen kuat terhadap kelompok, maka norma kelompok akan diikuti. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tolunay (2006) yang menyatakan bahwa individu akan dipengaruhi oleh mayoritas pendapat dari kelompok. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perilaku agresi yang dilakukan karena tuntutan dari mayoritas pendapat kelompok, dengan hal itu

perilaku agresi terlegitimasi oleh kelompok. Bila itu terjadi, potensi konflik yang menjurus kepada perilaku agresif bisa terjadi.

Kecenderungan perilaku agresif atau biasa yang disebut Agresivitas adalah sebagai keinginan yang relatif melekat untuk menjadi agresif dalam situasi yang berbeda. Dapat juga dikatakan agresivitas sebagai kecenderungan untuk menjadi agresif ( dalam Luthfi dkk, 2009). Agresi menurut Berkowitz didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental dengan maksud tertentu ( Berkowitz, 1993). Pendapatnya yang lain agresi tidak sama dengan amarah. Menurutnya, agresi berhubungan dengan perilaku yang disengaja sebagai usaha untuk tujuan tertentu: menyakiti orang lain baik fisik maupun psikis, jadi tindakan agresi adalah tindakan yang memiliki tujuan.

Baron mengatakan bahwa agresi merupakan segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan tersebut, baik fisik maupun psikis. Ini berarti bahwa jika individu menyakiti orang lain karena unsur ketidaksengajaan, maka perilaku tersebut bukan dikategorikan perilaku agresif. Rasa sakit akibat tindakan medis, walaupun dengan sengaja dilakukan bukanlah termasuk perilaku agresif. Sebaliknya, jika niat menyakiti orang lain tapi niat tersebut tidak berhasil, hal ini merupakan perilaku agresif (Dayakisni & Hudaniah, 2009).

Di Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, sehingga di dalam undang-undang negara terdapat undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap aksi menyampaikan pendapat di muka umum atau yang lebih dikenal aksi demonstrasi. Yaitu UU no.2 thn 2002 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, UU no.2 thn 2002 ini yang mendorong kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi unjuk rasa baik dari segi politik, ekonomi maupun individu dan kelompok. sehingga sering terjadi aksi unjuk rasa di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Akhir-akhir ini di setiap wilayah hukum negara Republik Indonesia sering terjadi



kegiatan aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh. kerusuhan, kekerasan massal, antara pendemo dengan aparat kepolisian sering terjadi. Ini disebabkan oleh para pendemo yang sulit diatur sehingga memaksa anggota polisi yang bertugas memberikan tindakan pengamanan. Aksi dorong mendorong antara para pendemo dan petugas kepolisian juga memberikan kontribusi terjadinya aksi unjuk rasa yang rusuh. Selain itu tindakan agresif anggota kepolisian karena mendengar para pendemo yang menghina, merendahkan, dan mencaci maki institusi kepolisian juga dapat menimbulkan kerusuhan dalam kegiatan aksi unjuk rasa.

Seperti contoh pada kejadian di depan kedubes AS, terjadi aksi unjuk rasa yang anarkis. Awalnya demo berjalan dengan baik, para pendemo menyampaikan tuntutan satu persatu, seiring wktu yang terus berjalan suhu udara semakin panas ditambah kemacetan lalu lintas disekitar tempat unjuk rasa memperkeruh suasana. lama kelamaan para pendemo memaksa untuk masuk ke dalam gedung Kedubes AS, tetapi dijaga oleh anggota polisi yang berjaga, lalu para pendemo memaksa masuk ke dalam gedung dengan mendorong barisan anggota polisi, anggota yang berjaga terpancing emosinya lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan tongkat T, menarik pendemo lalu menendang – nendang, melempari pendemo dengan benda keras yang ada di sekitar kejadian, mengusir dan membubarkan para pendemo dengan paksa menggunakan tongkat T, kayu rotan, dan tameng pelindung secara membabi buta terhadap pendemo sehingga banyak pendemo yang terluka dan para pendemo membalas dengan penyerangan yang akhirnya terjadi bentrok. 3 anggota polisi terluka dan belasan pendemo luka-luka (skalanews.com 17/9/2012). Tragedi priok juga menelan korban warga sipil, dan anggota sat brimob. Masih banyak peristiwa lain yang dapat diangkat, seperti: kejadian di depan istana presiden dimana anggota polisi melakukan pemukulan terhadap para pendemo dan seorang juru kamera dan wartawan di salah satu perusahaan surat kabar swasta, peristiwa aksi unjuk rasa di depan gedung MPR/DPR yang menolak kenaikan harga BBM yang berakhir rusuh belasan pendemo luka-luka dan beberapa anggota polisi terluka akibat lemparan batu, penembakan gas air mata, penyiraman air dengan kendaraan water canon.

Pasukan pengendali massa (dalmas), adalah pasukan POLRI yang berasal dari Samapta yang dipersiapkan dan dilatih secara khusus untuk menangani gangguan kamtibmas dan kejahatan yang bersifat massal sebagaimana yang diuraikan diatas. Berdasarkan kondisi nyata dan pengalaman sebagai anggota sat dalmas PMJ selama 3 tahun, bahwa tugas sat Dalmas memang penuh dengan tantangan dan mudah memicu munculnya perilaku agresi. Pasukan ini dalam pergerakannya di lapangan, selalu dalam bentuk kelompok baik dalam bentuk peleton (ton), kompi (ki), batalion (yon) sampai dengan detasemen (resimen). Dengan melihat dari karakteristik massa, jumlah massa dan eskalasi ancaman faktual yang dihadapi di lapangan. pasukan ini dilatih secara khusus tentang pengetahuan bagaimana cara mengendalikan massa, melokalisir, mengevakuasi dan membubarkan massa dengan aman dan tertib tanpa menimbulkan korban. Disamping dilatih secara khusus, pasukan ini juga dilengkapi dengan perlengkapan anti huru – hara, tameng, helm , dan kendaraan taktis serta dibekali pengetahuan bagaimana cara bersosialisasi dalam bentuk kompi dengan para pendemo.

Berkaitan dengan tugas yang penuh tantangan dan tekanan untuk memunculkan perilaku agresi, dalam kenyataan di lapangan, tidak semua anggota polisi yang bertugas pam aksi unjuk rasa melakukan tindakan agresif pada para pendemo. Tetapi ada juga sebagian anggota polisi yang tetap di barisan mempertahankan kekuatan barisan dan tidak melakukan tindakan agresif walaupun institusinya dihina, direndahkan, dan di caci maki. Pada umumnya, alasan munculnya perilaku agresi adalah sebagai salah satu wujud dan kecintaan terhadap institusi polri karena institusinya dihina, direndahkan, dan di caci maki oleh para pendemo. Adapun alasan dari polisi yang tetap berusaha bertindak ideal, dan menghindari perilaku agresi adalah karena dikhawatirkan tindakan agresif dapat mencoreng nama institusi polri. untuk itu dia bersikap ideal sebagai salah satu cara mempertahankan nama baik institusi atau korps nya sebagai identitas sosial.



Untuk meyakinkan lagi, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anggota dalmas. karena keterbatasan waktu, Wawancara dilakukan secara singkat. Peneliti mengambil 10 sampel anggota dalmas untuk diwawancarai dengan hasil 6 dari 10 anggota menjawab akan melakukan tindakan agresif apabila massa bertindak anarkis dengan menghina, melecehkan, dan mencaci maki. serta melempari polisi dengan batu dan kayu kepada anggota polisi karena alasan jiwa korsa dan loyalitas terhadap institusi. Dan 4 dari 10 anggota menjawab bersikap ideal untuk menjaga nama baik institusi polisi. Menurut mereka tindakan agresif yang dilakukan anggota polisi hanya akan menimbulkan masalah dan mencoreng nama baik institusi. Jadi, dia akan bersikap ideal sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas sosial terhadap institusi polri.

Dari beberapa peristiwa yang terjadi terdapat 2 (dua) perbedaan perilaku anggota polisi yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa. Ada yang bersikap agresif dan ada yang bersikap ideal dengan tidak melakukan tindakan agresif. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan, munculnya sikap dan tindakan yang berbeda dari anggota polisi didasari oleh alasan yang sama yaitu sebagai bentuk sikap mempertahankan identitas sosialnya terhadap Korps atau institusinya. Hal ini juga didasarkan pada loyalitas dan tanggung jawabnya membela dan mempertahankan nama baik institusi kepolisian. Dalam hal ini adalah anggota kepolisian sat dalmas polda metro jaya.

Berdasarkan data bahwa adanya perbedaan perilaku agresif dan perilaku ideal yang muncul dari anggota polisi yang bertugas pam aksi unjuk rasa, namun kedua-duanya memiliki dasar pemikiran yang sama yaitu sebagai bentuk loyalitas terhadap identitas mereka sebagai korps polisi, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai “Apakah Terdapat Hubungan Antara Identitas Sosial Dengan Kecenderungan Perilaku Agresif Pada Anggota Polisi Yang Bertugas Pam Aksi Unjuk Rasa di Sat Dalmas pmj ?”, yang merupakan wilayah hukum yang paling kompleks.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Tajfel mendefinisikan Identitas sosial sebagai pengetahuan individu dimanadia merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi serta nilai (Tajfel, 1979).[10] Identitas sosial juga merupakan konsep diri seseorang sebagai anggota kelompok (Abrams & Hogg, 1990), sedangkan Menurut Berkowitz dalam Wastson, agresivitas didefinisikan sebagai perilaku yang diarahkan untuk melukai orang lain. Hal ini berarti perilaku melukai orang lain karena kecelakaan atau ketidaksengajaan tidak dapat dikategorikan sebagai agresivitas apabila bertujuan melukai orang lain dan berusaha untuk melakukan hal ini walaupun usahanya tidak berhasil. Pengendalian massa adalah salah satu bagian dari tugas polisi yang merupakan kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di muka umum guna mencegah mencegah masuknya pengaruh dari pihak tertentu atau provokator (Sutanto, 2004).

Seperti hal yang diuraikan di atas bahwa anggota polisi khususnya pada anggota yang bertugas di daerah wilayah hukum Polda Metro Jaya juga menangani masalah Kamtibmas yang sifatnya massal, sikap dan perilaku para massa demonstran terhadap anggota polisi khususnya anggota Dalmas sebagai garis terdepan penugasan kepolisian yang sering melontarkan ejekan dan kata-kata kotor, menghina, dan mencaci maki anggota polisi, serta melakukan aksi pendorongan, pelemparan benda-benda yang berbahaya, dan lagi melakukan pemukulan dengan menggunakan benda keras, mendorong emosi pada anggota polisi yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa untuk melakukan tindakan agresif. eskalasi massa demonstran yang bertambah pun mendorong massa kearah tindakan anarkis. Hal ini yang menimbulkan perilaku agresif yang dilakukan oleh anggota polisi yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa terhadap para demonstran karena sulitnya diatur, cacian dan hinaan yang dilontarkan oleh masa demonstran terhadap institusi polri membuat anggota polisi yang bertugas menjadi marah dan



emosi karena mereka merasa institusinya sebagai identitas sosial mereka dihina dan dicaci maki, mereka tidak terima dengan perlakuan para demonstran yang menghinda dan mencaci maki institusi polri.

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penelitian tentang “Hubungan Antara Identitas Sosial Dengan Kecenderungan perilaku agresif Pada Anggota Polisi Yang Bertugas Pam Aksi Unjuk Rasa Di Sat Dlamas Polda Metro Jaya”, peneliti membatasi masalahnya dengan menjelaskan pengertian tentang Identitas Sosial pada anggota polisi Sat Dalmas Polda Metro Jaya yang meliputi aspek kesadaran akan keanggotaan dalam kelompok, aspek evaluasi akan keanggotaan dalam kelompok, dan aspek perasaan yang terkait keanggotaan dalam kelompok. selain itu, peneliti juga membatasi masalah kecenderungan perilaku agresif (agresivitas) yang dialami oleh anggota Dalmas yang meliputi agresi fisik, agresi verbal, hostile (permusuhan), dan anger (kemarahan). Dengan sampel yang akan dijadikan objek penelitian adalah Bintara remaja anggota Dalmas Polda Metro Jaya yang berpangkat Brigadir yang bertugas piket on call yang siap sedia menjalankan penugasan 24 jam yang kebanyakan anggotanya adalah anggota yang baru selesai menyelesaikan pendidikan.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara identitas sosial dengan kecenderungan perilaku agresif pada anggota polisi yang bertugas Pam aksi unjuk rasa di Sat Dalmas Polda Metro Jaya?”

### 1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan serta sumbangan yang efektif antara identitas sosial dengan kecenderungan perilaku agresif pada anggota polisi yang bertugas Pam unjuk rasa di Sat Dalmas Polda Metro Jaya yang memiliki wilayah hukum yang paling kompleks.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat penelitian secara teoritis adalah: sebagai salah satu contoh bagaimana penerapan konsep identitas sosial dan kecenderungan perilaku agresi pada fenomena nyata di lingkungan, terutama yang berkaitan dengan tugas kepolisian dalmas.
2. Manfaat penelitian secara praktis adalah dengan mengetahui hubungan antara identitas sosial dengan kecenderungan perilaku agresif pada anggota polisi sat dalmas, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pimpinan dan kesatuan polda metro jaya untuk memberi perhatian terhadap aspek identitas sosial dari segi pekerjaan sebagai anggota dalmas untuk menekan kecenderungan perilaku agresif pada saat menjalankan tugas.



### 1.7. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang tiap bab nya terdiri dari sub-sub bagian, sebagai berikut :

1. Bab 1 berisi pendahuluan yang membahas latar belakang, Identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 berisi tinjauan pustaka. Pada bagian ini akan diuraikan pengertian, faktor yang mempengaruhi, ciri atau aspek mengenai Identitas sosial dan kecenderungan perilaku agresif, serta para anggota polisi yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa dan hubungan antara Identitas Sosial dan kecenderungan perilaku agresif beserta hipotesis penelitian.
3. Bab 3 menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari identifikasi variable penelitian, definisi operasional, populasi dan pengambilan sampel, metode pengambilan data dan analisis data.
4. Bab 4 berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penelitian, hasil penelitian serta pembahasan.
5. Bab 5 Bagian penutup memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran.